

TIDAK bisa dimungkiri bahwa persoalan terorisme merupakan masalah serius yang dihadapi bangsa ini. Bahkan, sekolah harus benar-benar memberikan perhatian khusus terhadap pola pembelajaran bagi anak-anak didik, bagaimana mengantisipasi atau menihilkan pengaruh terorisme.

Yang pasti tantangan pendidikan sekarang ini sangat kompleks. Salah satunya ialah terorisme. Sekolah tidak bisa tinggal diam dengan persoalan ini karena tidak sedikit anak muda lulusan sekolah banyak bergabung dalam barisan teroris. Pendidikan di sekolah tidak cukup diberikan apa adanya, tetapi harus didesain dengan berbagai materi baru atau pelatihan sehingga siswa tidak buta dalam membaca laju peradaban zaman yang makin canggih.

Kalau pengajar salah memberikan materi ilmu pengetahuan, siswa bisa terjerumus dalam peta terorisme global yang membahayakan. Guru menjadi faktor penentu karena siswa di masa depan hingga sampai menjadi korban, tetapi menjadi solusi bagi berbagai persoalan bangsa. Di sinilah tantangan serius guru dan sekolah dipertaruhkan sehingga sekolah menjadi rujukan utama siswa dalam membaca peta dunia yang terus bergerak.

Wajah terorisme hari ini mengalami perkembangan baru. Menurut Agus Surya Bekti (2015), terorisme menjadikan media sosial sebagai instrumen yang tidak hanya menghadirkan propaganda baru yang mengancam NKRI, tetapi juga didesain untuk merekrut kelompok remaja. Beberapa contoh dari berbagai negara yang bergabung dengan IS ke Suriah ialah kalangan remaja dengan kisaran usia 18-25 tahun yang sebagian karena terpengaruh melalui media sosial.

Anehnya lagi, dunia maya mampu merekrut kalangan terdidik dan kelas menengah. Agus menceritakan seorang Ayman al-Zawahiri, pemimpin Al-Qaeda pengganti Osama, pada 2005 menuliskan pesan kepada pemimpin Al-Qaeda di Irak (AQI) Abu Musab al-Zarqawi, "Kita sedang dalam peperangan dan separuh lebih dari peperangan itu terjadi di media. Kita sedang dalam peperangan media demi merebut hati dan pikiran umat kita." Jelas sekali peperangan media telah lama ditubuh kelompok teroris sebagai medan dan sekaligus strategi baru.

Pada 1988 Osama bahkan telah membentuk departemen media di dalam struktur organisasinya. Kini kehadiran media internet telah membuat medan perang itu semakin rumit. Media internet dimanfaatkan kelompok teroris sebagai kontranarasi dari media *main-stream*. Fakta ini harus menyadarkan bangsa Indonesia, khususnya lembaga pendidikan.

Ini juga berangkat dari penelitian Sidney Jones, peneliti terorisme dari International Crisis Group (ICG), yang melihat sekolah banyak mengajarkan intoleransi, termasuk lahir dari rohis yang menjamur. Komunitas rohis sering mengajarkan Islam yang marah sehingga melahirkan corak pemikiran keislaman siswa yang intoleran (ICG: 2011).

Demikian juga dilaporkan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta (2012) dan Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) Pascasarjana UGM (2012) yang menjelaskan sikap intoleransi banyak dilakukan di kalangan guru agama.

Tantangan Pendidikan

Sekolah ialah sumbernya ilmu pengetahuan. Perilaku masyarakat dan bangsa ini sangat terkait dengan apa yang dipelajari dan diajarkan di sekolah. Dari sini, sekolah mempunyai peran penting dalam pembentukan masyarakat. Guru sebagai ujung tombak sekolah harus berada di garda paling depan dalam mewujudkan sekolah lembaga yang menghadirkan wacana dan aksi keberagaman yang jauh dan menjauhkan terorisme.

Untuk itu, guru harus bergerak dan bangkit dengan penuh semangat sehingga sekolah memberikan bekal yang kuat bagi peserta didik dalam menjawab problem terorisme global. Ada beberapa hal yang mesti dilakukan guru.

Pertama, bagi guru agama, sudah saatnya menghadirkan wajah ajaran agama yang ramah, bukan agama yang marah. Ini harus diperankan guru agama dengan baik sehingga ajaran agama yang diberikan kepada siswa membangun mental siswa yang menenteramkan dan menyejukkan, bukan marah dan merusak orang lain. Guru agama juga harus membaca peta gerakan terorisme global sehingga tidak salah tafsir dalam memberikan penjelasan kepada



siswa ihwal berbagai tragedi terorisme global yang mesti dipahami dengan baik oleh siswa.

Kedua, guru, apa pun mata pelajarannya, harus mengajak siswa untuk cinta kepada tanah air bernama Indonesia. Ajaran cinta tanah air ini akhir-akhir ini mulai pudar sehingga siswa menjadi kosong dan hampa dalam memahami kehidupan berbangsa dan bernegara. Cinta tanah air tentu saja harus dibarengi dengan berbagai kisah perjuangan para pendiri bangsa ini dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Jangan sampai siswa lupa dengan sejarah bangsanya sendiri. Atau dalam ungkapan Bung Karno, "Jangan sekali-kali melupakan sejarah (jasmerah)." Ini akan mampu membentuk mental siswa yang cinta tanah air yang berpijak pada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Ketiga, guru dan sekolah dalam berbagai kegiatan dan event harus menginternalisasikan nilai-nilai keindonesian untuk meneguhkan karakter siswa. Nilai-nilai luhur bangsa harus masuk berbagai ekstrakurikuler sehingga siswa menyelami makna luhur yang diciptakan para pendahulunya. Nilai-nilai luhur bangsa harus selalu dihidupkan sehingga siswa mengenal lebih mendalam nilai hidup yang sudah tertanam ratusan tahun dan terbukti memberikan daya kolektivitas dan kedamaian bagi bangsa ini. Guru mesti mampu mengkreasi dengan berbagai inovasi sehingga siswa mendapatkan sentuhan yang aliamah dan berkepribadian.

Tiga hal itu harus digerakkan bersama-sama oleh seluruh guru. Siswa harus dilibatkan lebih aktif sehingga guru dan siswa mempunyai sinergi dan dialektika. Bisa juga menggunakan kreativitas lain, yang penting mampu membentuk karakter siswa yang cinta tanah airnya, toleran, menghargai jasa para pejuang, dan siap berjuang untuk Indonesia masa depan.

Desain Ulang Kurikulum

Tantangan terorisme global juga mesti dibarengi guru dengan memformat ulang desain kurikulum yang ada. Tantangan di depan mata selalu berkembang secara cepat, sedangkan desain kurikulum sudah baku sebagaimana dicetak Kemendikbud dan Kemenag. Untuk itu, dalam aplikasinya di kelas, guru harus mampu menghadirkan wajah kurikulum yang bisa menjawab berbagai problem aktual yang terus berkembang.

Desain kurikulum tidak cukup hanya mengacu dalam kertas, tetapi juga mesti disinergikan dengan berbagai problem kemasyarakatan yang selalu muncul setiap saat. Desain kurikulum bukan berarti mengganti kurikulum. Desain di sini ialah kemampuan guru untuk hadir dengan suasana dan pola yang menyegarkan, sesuai dengan problem yang sedang dihadapi siswa.

Ini bukan saja membutuhkan belajar yang serius, tetapi guru juga mesti cerdas secara emosional dan rohani sehingga siswa mampu menangkap pesan universal setiap ilmu sebagai bekal kehidupan sehari-hari. Tantangan ini memang berat, tetapi jiwa guru harus selalu siap dengan takdir/jalan hidup yang penuh keberkahan dan ketulusan.

Penyelewan Dana Desa

RIZA MULTAZAM LUTHFY

Peneliti Desa, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta

INSPEKTUR Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sugito, menyebutkan evaluasi penggunaan dana desa menunjukkan adanya penyelewengan oleh oknum-oknum kepala desa sebesar 10% dari total dana desa yang disalurkan.

Setelah ditelusuri secara mendalam, kinerja kepala desa kurang transparan dan akuntabel. Terutama mengenai kondisi keuangan desa, mereka cenderung tertutup. Mereka enggan menyajikan laporan keuangan pemerintahan desa kepada publik, sehingga besarnya dana desa sekaligus penyalurannya tidak pernah diketahui oleh masyarakat.

Intensitas dan produktivitas kinerja mereka sangat rendah. Daripada memfokuskan diri pada upaya memjahterakan masyarakat desa, mereka lebih memikirkan urusan perut. Mentalitas berburu rupiah menemukan momentumnya ketika dana desa hadir dalam rangka mengatasi problematika kehidupan desa. Tata kelola keuangan yang seyogyanya berdasarkan prinsip komunal justru mengedepankan nilai-nilai egosentrisme.

Dialirkannya dana yang bersumber dari APBN ini oleh Pemerintah Pusat ke semua desa membuat elite lokal tergiur untuk menikmati. Terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan oleh sejumlah pihak dengan menjadikannya proyek bersama. Mereka seolah melakukan balas dendam terhadap nasib yang tak

kunjung berubah. Uang yang seharusnya digunakan untuk pengadaan dan perbaikan fasilitas desa justru masuk ke kantong pribadi.

Jika ini yang terjadi, fungsi dan peran kepala desa dalam produk legislasi tidak berjalan sebagaimana semestinya. Apa yang terjadi di desa merupakan perbedaan praktik hukum dengan teorinya. Terdapat jurang pemisah antara *das sein* dan *das sollen*. Hukum dalam kehidupan masyarakat berada dalam tataran realitas ketimbang idealitas, sehingga bercorak *law in practice*, bukan *law in book*.

Perlawanan Pasif

Ketika superioritas dan dominasi kepala desa begitu besar, masyarakat kehilangan akses dan kontrol. Pemerintahan desa berjalan sesuai kehendak para pemangkuanya. Tanpa evaluasi dari pihak luar, mereka yang duduk dalam jajaran perangkat desa tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan. Kasus penyelewengan kerap bermula dari praktik pemerintahan desa tanpa supervisi.

Itulah mengapa sejumlah tokoh desa dan masyarakat awam mempermasalahkannya hal tersebut. Mereka yang masih menjunjung tinggi etika tradisional hanya membicarakan secara diam-diam secara personal dan dalam forum tertutup. Perhatian masyarakat terhadap kehidupan desa diwujudkan dengan cara membahas rendahnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dengan

sembunyi-sembunyi. Kurang pantasnya jika keluhan disampaikan kepada kepala desa secara langsung. Di sini tata krama dan sopan santun diaktualisasikan tidak pada tempatnya.

Sejarah mencatat selama ratusan tahun kepala desa mempunyai strata so-



Jika BPD berperan secara maksimal, dampak dan pengaruh yang ditimbulkan dari lahirnya BPD sangatlah besar. Yang paling nyata yaitu berlangsungnya pergeseran kekuatan politik, sehingga dinamika politik desa tidak lagi berpusat pada kepala desa.

sial yang tinggi. Tersebar asumsi publik bahwa kepala desa memerankan sosok pengayom dan pelindung. Abdur Rozaki (2005:181) menilai anggapan ini menjadi faktor utama mengapa kehidupan desa berjalan secara timpang. Relasi sosial-politik terhambat oleh budaya *ewuh-pukewuh* dan *patron-client*.

Meskipun demikian, apa yang dilakukan masyarakat merupakan perlawanan pasif yang bermaksud mengingatkan penguasa dengan cara menghindari konflik. Orang desa lebih mengutamakan

keselarasan daripada timbulnya problem sosial. Mereka ingin mengubah keadaan, akan tetapi berbentur kultur dan realitas. Jadilah teras sebagai forum paling ideal dalam membidik siapa saja yang ikut menentukan kebijakan desa. Reaksi dan penilaian terhadap kinerja pemerintahan desa dilakukan dalam lingkup terbatas.

Perlunya Kontrol

Supaya kekuasaan kepala desa tidak rentan disalahgunakan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semestinya menjalankan perannya dengan baik. Wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis tersebut diberi wewenang untuk mengadakan kontrol terhadap pemerintahan desa, agar kinerja kepala desa beserta jajaran bisa terarah. BPD berperan besar dalam terwujudnya demokrasi desa. Ruang kontrol dan keseimbangan kekuasaan di desa jadi lebih terbuka.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan salah satu fungsi BPD yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa (Pasal 55 c). Selain sebagai pembuat undang-undang (legislatif) pada level desa, BPD juga merupakan badan yang mendapat kepercayaan masyarakat untuk mengontrol kinerja kepala desa supaya bisa maksimal dan terarah. Hal ini merupakan bentuk pengawasan politik sekaligus pembatasan kekuasaan monolitik di tangan kepala desa.

Jika BPD berperan maksimal, dampak dan pengaruh yang ditimbulkan dari lahirnya BPD sangatlah besar. Yang paling nyata yaitu berlangsungnya pergeseran kekuatan politik, sehingga dinamika politik desa tidak lagi berpusat pada kepala desa. Fungsi legislasi, kontrol dan penggalangan aspirasi yang dimiliki BPD dapat menggeser posisi dan fungsi politik kepala desa.

Akibatnya, di desa tidak lagi terjadi tarik-menarik politik yang syarat muatan dan kepentingan. Secara ideal, BPD sanggup membawa cakrawala baru dalam pemerintahan desa serta mengubah dinamika sosial dan politik desa yang sebelumnya cenderung sentralistik dan mengabaikan mekanisme *checks and balances*.

Selain BPD, fungsi kontrol juga harus dijalankan pendamping desa yang memiliki wewenang untuk mengawasi penggunaan dana desa. Salah satu tujuan dibentuknya pendamping desa adalah agar dana desa yang dicairkan di setiap desa tersalurkan dengan baik. Mereka mendapat mandat untuk membimbing pemerintah desa dalam mengelola dana desa secara akuntabel dan transparan.

Digelontorkannya dana desa terutama dalam rangka memperbaiki infrastruktur desa, semisal jalan, jembatan, gorong-gorong, irigasi, dan lain-lain. Jangan sampai pemanfaatan dana desa terbukti menyalahi prosedur. Rupiah yang digelontorkan dari pemerintah pusat tidak boleh menjadi "bancakan" bagi tokoh-tokoh lokal.

PARTISIPASI OPINI

LampungPost menerima opini orisinal dan tidak ditulis ke media lain, tak lebih dari 5.000 karakter. Kirim via e-mail ke opini@lampungpost.co.id dengan mencantumkan nomor kontak dan rekening bank. Kami menggunakan tulisan yang mengaji fenomena aktual di lingkungan masyarakat Lampung. Setiap artikel/tulisan, foto atau materi apa pun yang telah dimuat di Lampung Post dapat dipublikasikan atau diilustrasikan kembali dalam format digital dan atau non digital tetapi merupakan bagian dari hak cipta.

LAMPUNG POST logo and address information: Direktur: Usman Kansong, Kepala Divisi Perencanaan/Peranggung Jawab: Iskandar Zulhamak, Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono, Dewan Redaksi Media Group: Bambang Eka Wijaya, Djadjil Sudrajat, Eiman Sanjigh, Gaudensius Sufandi, Laurens Yala, Lestari Moendjati, Najwa Shihab, Putra Nababan, Rahmi Lowthor Schrad, Saif Hutebarat, Suryopratomo, Usman Kansong, Kepala Divisi Pemberitaan: D. Widodo, Kepala Divisi Content Enrichment: Islok Susanto, Kepala Divisi Percepatan: Kresna Murti, Asisten Kepala Divisi: Nova Lidani, Musti'an Basori, Siti Agustina, Sekretariat Redaksi: Nani Hasela.

Redaktur: Abdul Gouf, Iqar Jusaidi, Muhammad Candra Luginia, Padli Pamdan, Rinda Mulyani, Vera-Agilia, Wilik Hastuti, Asisten Redaktur: Arie Susanto, Delima Natalia Napitupala, Dian Wahyu Kusuma, Eka Selwason, Fathul Mu'in, Ricky P. Marly, Susilawati, Wandi Barboj, Liputan Bandar Lampung: Adi Sunarya, Dewi Zulhiyati, Fehi Hermanika, Firman Luqmanul Hakim, Ihsan Dwi Satryo, M Umarudinayah Mokoagow, Nur Janah, Setiaji Bintang Pamungkas, Umar Wira-Hadi Kusuma, Zahrudin, Liputan Jakarta: Hessa Eryani, Luchito Sangeko, Radio SAI-LAMPUNG.CO.ID: Isonaw Djamiludin (Redaktur), Anuril Septian Mak, Publishing (Tabloid, Majalah, Buku): Rahmat Hidayat, Djadi Samriko, Content Enrichment Bahasa: Wij Sukanto (Asisten Redaktur), Chohri, Kumbisan, Akilanta.

Desain Grafis/Foto Redaktur: Herichwan Gumala, Asisten Redaktur: Supeng Riyadi, Nurul Fatmi, Rizwanah, Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanai, Lampung Barat): Mai Saleh (Kabiro), Arispah (Asisten Kabiro), Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto, Candra Putra Wijaya, Yon Fisoma, Fajar Nafira, Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chaidudin (Kabiro), M. Wahyudin Pamungkas (Asisten Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoji Hartawan Jaya, Bhuwanuddin, Suprayogi, Muzaniff Effendy Y, Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Samoso Siameang (Kabiro), Mewan (Asisten Kabiro), Plan Pranata, Biro Wilayah Barat (Tanggemu, Pringsewu, Pesawaran): Widodo (Kabiro), Abu Umarali, Mif Sulaiman, Sudiono, Ahmad Amri.

Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), An Nisobabiano, Juwanoro, Senior Account Manager Jakarta: Prita R Darnak, Senior Account Manager Lampung: Syarifudin, Account Manager Lampung: Eddy Hariyanto, Account Manager Iklan Biro: Siti Fatmahan, Manager Sirkulast: Indra Sularyoto, Manager Keuangan & Akuntint: Hardiko, Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (071) 783693 (hunting), 773888 (redaksi), Faks: (071) 783578 (redaksi), 783598 (usaha), <http://www.lampungpost.co.id>, redaksi@lampungpost.co.id, redaksi@lampungpost@yahoo.com, Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-3, Hiedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113, Kallanda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kallanda, Telp/Fax: (0772) 323130, Pringsewu: Jl. Kijajar Dewan-

tan No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900, Kobagang: Jl. I. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708, Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0729) 47275, Kallabumi: Jl. Pemasaryakatan Telp/Fax: (0724) 26290, Liris: Jl. Raden Intan No. 65, Telp/Fax: (0728) 21281, Penerbit: PT Masa Kini Mandiri, SLFPP: SK. Menpan RI No.150A/Depens/SLEPPA.7/1986 15 April 1986, Percepatan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Idi di Luar Tawang Jawab Percepatan. Harga: Eoran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (Ibar kota + ongkos kirim), DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENEMBAJAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN, Member of logo.